

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur bertujuan untuk menghubungkan penelitian dengan penelitian lain yang lebih besar dan lebih luas, guna untuk mendapatkan *gap* atau kesenjangan penelitian dan memperluas penelitian dengan cara membaca penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan literatur dapat diimplementasikan dengan 4 (empat) bentuk yaitu tinjauan literatur yang mengintegrasikan apa yang telah dilakukan dan dikatakan penelitian sebelumnya, melakukan kritik terhadap penelitian sebelumnya. Membangun keterhubungan antar topik terkait dan mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang (Creswell, 2013a).

Literatur pertama yang peneliti gunakan sebagai rujukan ialah sebuah jurnal dengan judul “*Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut*” ditulis oleh Ichwani, Rebala dan Farida yang diterbitkan oleh *Diponegoro Law Journal* dan dipublikasikan pada tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana peran UNODC dalam memberantas perdagangan narkotika dalam skala global dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konsep hukum internasional sebagai acuan dalam penelitiannya.

Kejahatan transnasional terorganisasi menjadi salah satu ancaman terhadap keamanan suatu negara salah satunya ialah perdagangan narkotika dalam skala global, dimana hal ini juga didukung oleh adanya wujud dari globalisasi yang

memudahkan setiap individu di dunia ini untuk bergerak secara bebas terutama dalam konteks perdagangan yang dimana hal ini dimanfaatkan orang-orang terutama para kelompok kriminal untuk memanfaatkan dampak dari globalisasi tersebut. UNODC sebagai kantor yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tugas dan fungsi dalam perdamaian dan keamanan global turun tangan untuk menangani kasus ini dengan melakukan strategi kerja sama dengan negara-negara anggota melalui program *The Global Maritime Crime Programme (TGMCP)*, *Program Governance Committee (PGC)*, dan kampanye serta berbagai pelatihan.

Dari jurnal diatas, terdapat kesimpulan jika pendekatan lintas negara dan meningkatkan keamanan di wilayah perairan dibutuhkan untuk menyikapi pemberantasan narkoba yang melalui laut secara global. Melihat adanya fenomena ini maka UNODC membuat program *The Global Maritime Crime, Governance committee* dan berbagai gerakan sosial serta *workshop* (Ichwani et al., 2022).

Persamaan yang ada di dalam jurnal di atas dan penelitian yang sedang dilakukan adalah menggunakan peran dari aktor internasional yang sama yaitu UNODC dan menggunakan program-program yang diusut oleh UNODC untuk menangani kasus kejahatan dalam skala global. Namun, terdapat pula perbedaan yaitu fokus pembahasan, dimana jurnal diatas membahas mengenai perdagangan narkoba melalui akses laut dalam skala global, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perdagangan satwa liar secara ilegal di Meksiko.

Selanjutnya, peneliti menggunakan jurnal dengan judul “Peran *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Dalam Mencegah *Bride Trafficking* di India Tahun 2011-2014” yang ditulis oleh Darma dan Pahlawan yang diterbitkan dalam Jurnal *Online* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pada tahun 2016. Jurnal ini membahas bagaimana peran UNODC dalam mencegah terjadinya *bride trafficking* di India periode 2011-2014 yang disertai dengan teori organisasi internasional. *Bride trafficking* atau penjualan pengantin merupakan salah satu bentuk dari aktivitas *human trafficking* dimana “pengantin” yang menjadi korban diberi harapan dan janji untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia, kebanyakan korban dari penjualan pengantin ini di dominasi dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Perilaku diskriminasi juga kekerasan rentan terjadi kepada para perempuan-perempuan di pedesaan India yang diakibatkan dari dampak tradisi, seringkali para korban mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis juga hilangnya hak-hak dasar mereka. UNODC sebagai organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga bekerja di bidang pencegahan atas kekerasan menaruh perhatiannya terhadap kasus perdagangan pengantin yang terjadi di India ini, peran yang dilakukan oleh UNODC ini mencakup kerjasama dengan pemerintah India berbagai NGO (*Non-Governmental Organization*) dan masyarakat lokal India, UNODC memberikan penyuluhan berupa sosialisasi mengenai bahaya dari perdagangan pengantin, UNODC juga membuat program 3P yaitu Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan. Dalam menangani hal ini, UNODC mengalami berbagai macam hambatan yang membuat implementasi dari program-program yang telah dibuat

terhambat seperti dana yang tidak mencukupi untuk NGO dalam membantu para korban yang selamat dari perdagangan pengantin, kurangnya tenaga medis dan juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah India.

Dalam artikel jurnal ini, ditemukan sebuah kesimpulan dimana program yang dilaksanakan oleh UNODC di India mengenai fenomena *bride trafficking* mengalami berbagai hambatan seperti dana yang tidak mencukupi untuk NGO guna membantu para korban yang selamat dari perdagangan pengantin, kurangnya tenaga medis dan juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah India (Darma & Pahlawan, 2016).

Terdapat persamaan dari jurnal di atas dan penelitian yang sedang dibahas yaitu aktor yang berperan untuk menangani isu ini ialah UNODC . Namun, terdapat pula perbedaan yaitu fokus penelitian dimana jurnal di atas membahas mengenai perdagangan pengantin di India sedangkan penelitian ini membahas mengenai perdagangan satwa ilegal di Meksiko.

Ketiga, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul “Efektivitas Program *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Penanganan Peredaran Opium di Afghanistan*” yang ditulis oleh Pratiwi dan dipublikasikan oleh *eJournal Ilmu Hubungan internasional* pada tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana efektivitas program dari UNODC dalam menangani peredaran opium di Afghanistan, dengan menggunakan konsep organisasi internasional, efektivitas program dan *drug control* jurnal ini menyatakan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam menangani kasus ini seperti salah satunya yaitu pemberontakan yang mencegah terjadinya pemberantasan terhadap opium karena

opium menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi para pemberontak, juga terdapatnya krisis ekonomi diantara rakyat Afghanistan yang menyebabkan mereka menjadi petani opium yang dibayar dengan upah rendah dan imbalan berupa keamanan yang dijamin oleh pemberontak. Meskipun upaya dan berbagai program yang dilakukan oleh UNODC tidak begitu efektif namun UNODC tetap melakukan penanganan peredaran opium di Afghanistan dengan cara mengontrol budidaya opium di berbagai provinsi di Afghanistan.

Terdapat kesimpulan dalam jurnal ini dimana penanganan terhadap penyebaran opium di Afghanistan dinilai tidak efektif karena banyaknya faktor hambatan seperti munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh warga Afghanistan, dimana kebanyakan mereka menjadi petani opium sebagai mata pencahariannya (Pratiwi, 2017).

Terdapat persamaan dalam jurnal di atas dan penelitian yang sedang dilakukan yaitu menggunakan konsep organisasi internasional dan juga menggunakan aktor internasional yang sama yaitu UNODC dan membahas program-program yang digagas oleh UNODC untuk keamanan Bersama. Perbedaan yang terdapat di dalam jurnal dan penelitian ini yaitu fokus topik permasalahan dan lokasi, dimana artikel jurnal ini membahas mengenai peran UNODC dalam penanganan peredaran opium di Afghanistan sedangkan penelitian ini membahas mengenai perdagangan satwa ilegal yang terjadi di Meksiko.

Keempat, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul "*Exploring the Africa-Asia Trade Nexus for Endangered Wildlife Used in Traditional Asian*

Medicine: Interviews With Traders in South Africa and Vietnam” yang ditulis oleh *Nguyen dan Roberts* dan dipublikasikan oleh *Tropical Conservation Science* pada tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana metode yang efektif untuk mendeteksi dan memantau perdagangan satwa liar ilegal terutama dari rute Vietnam-Afrika Selatan maupun sebaliknya dengan menggunakan konsep kejahatan transnasional. Bagian dari tubuh satwa liar yang terancam punah diselundupkan sebagai bahan pengobatan tradisional maupun konsumsi pribadi.

Toko obat-obatan tradisional di Afrika Selatan maupun di Vietnam, banyak yang menjual sisik trenggiling sebagai produk komersilnya dimana sisik trenggiling dapat digunakan sebagai bahan pengobatan untuk berbagai penyakit, selain itu juga toko obat-obatan tradisional di Afrika Selatan menyediakan cangkang kura-kura yang telah diolah kedalam bentuk pil. Perlu untuk diketahui jika sesungguhnya trenggiling merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan telah tercantum di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). Upaya yang dilakukan untuk menangani aktivitas perdagangan satwa liar ilegal terutama dari rute Vietnam-Afrika Selatan maupun sebaliknya dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang dimana salah satunya ialah dengan memperketat keamanan di bandara dan perbatasan.

Perdagangan satwa liar yang dilakukan secara ilegal terjadi secara terselubung seiring dengan berjalannya waktu, penting untuk memantau perdagangan dengan tidak hanya melihat atau mengajukan pertanyaan langsung. Selain itu, untuk memastikan kelangsungan hidup satwa liar, undang-undang domestic Afrika Selatan dan Vietnam harus ditingkatkan untuk melindungi spesies

non-asli dan meningkatkan penegakan hukum terhadap satwa liar (Nguyen & Roberts, 2020).

Terdapat persamaan diantara jurnal di atas dan penelitian ini, dimana jurnal di atas membahas mengenai satu topik permasalahan yang sama yaitu perdagangan satwa liar ilegal dengan menggunakan konsep yang sama yaitu konsep kejahatan transnasional. Namun, terdapat pula perbedaan dalam fokus lokasi dimana jurnal di atas membahas mengenai perdagangan satwa liar ilegal di Vietnam dan Afrika Selatan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di Meksiko.

Kelima, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul “*Synthesizing Knowledge on Crime Convergence and the Illegal Wildlife Trade*” yang ditulis oleh *Anagnostou* dan dipublikasikan di dalam *Environmental Challenges* pada tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana *transnational organized crimes group* dapat berperdan dan terlibat dalam perdagangan satwa liar yang dilakukan secara ilegal, dimana jurnal ini menggunakan konsep kejahatan transnasional. Organisasi kriminal transnasional dapat terlibat dalam berbagai aktivitas kejahatan seperti perdagangan ilegal satwa liar melalui berbagai infrastruktur logistik yang tersedia. Melalui *convergence setting* yang terdapat dalam jurnal ini, menyatakan bahwa terjadinya kolaborasi kejahatan yang dilakukan antar kelompok kriminal, contohnya yaitu restoran yang menyajikan hidangan yang terbuat dari satwa liar dan kebun swasta ilegal yang juga menawarkan pekerja seks secara ilegal di Vietnam.

Convergence setting pada umumnya berbicara mengenai lokasi fisik di mana pelaku bertemu, melakukan kolaborasi, bertukar barang yang ilegal, dan merencanakan berbagai pelanggaran untuk dilakukan di masa depan. Dalam *convergence setting*, tempat-tempat layaknya penjara atau *bar* lokal dapat memberikan fasilitas kolaborasi antar kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional sering terjadi di wilayah-wilayah yang kedaulatannya tumpang tindih seperti wilayah Tri-Border (Argentina, Brasil dan Paraguay) dan *The Golden Triangle* di Asia Tenggara.

Melalui *convergence setting* yang terdapat dalam jurnal ini, menyatakan bahwa terjadinya kolaborasi kejahatan yang dilakukan antar kelompok kriminal untuk memperluas aksi dan tindakan kejahatan mereka, terutama di wilayah yang kedaulatannya masih dipertanyakan atau wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi (Anagnostou, 2021).

Persamaan yang terdapat dalam jurnal di atas dan penelitian yang sedang dibahas yaitu fokus pembahasan yang menyatakan bahwa aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan transnasional dapat mengancam keamanan manusia juga lingkungan. Namun, terdapat juga perbedaan dimana jurnal di atas lebih memfokuskan bagaimana konvergensi kejahatan transnasional secara umum dengan perdagangan satwa liar, sedangkan penelitian ini memberikan fokus hanya kepada perdagangan satwa liar secara ilegal dan menggunakan aktor internasional yaitu UNODC untuk meminimalisir terjadinya fenomena perdagangan satwa liar ilegal.

Keenam, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul “*The Geopolitical Ecology of Conservation: The Emergence of Illegal Wildlife Trade as National Security Interest and the Reshaping of US Foreign Conservation Assistance*” yang ditulis oleh *Massé dan Marguiles* yang diterbitkan di dalam *World Development* pada tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perdagangan satwa liar secara ilegal sebagai ancaman keamanan nasional dapat mempengaruhi bantuan konservasi asing yang dilengkapi dengan konsep geopolitik ekologi. Ketika satu negara menganggap perdagangan satwa liar ilegal sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan nasional, maka hal ini dapat menarik banyak perhatian dan dukungan terutama dari komunitas internasional, termasuk bantuan luar negeri dan bantuan konservasi. Dengan menetapkan perdagangan satwa liar secara ilegal sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, membuat negara-negara juga organisasi internasional sadar bahwa terdapat dampak negatif dari adanya perdagangan satwa secara ilegal, dimana pemerintah juga memandang aktivitas perdagangan satwa liar ilegal sangat erat kaitannya dengan kejahatan transnasional. Maka dari itu, aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal dapat mempengaruhi alokasi bantuan konservasi asing untuk mengatasi hal tersebut.

Terdapat ancaman yang nyata terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh perdagangan satwa liar secara ilegal, dimana dampaknya dapat membentuk kegiatan kerjasama dalam bentuk bantuan konservasi asing melalui jaringan dan ruang yang saling berkaitan. Dalam jurnal ini, ditemukan bahwa ekologi geopolitik merupakan sebuah kerangka yang produktif untuk melakukan

penelitian terhadap bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik dan lingkungan hidup yang saling membentuk satu sama lain (Massé & Margulies, 2020).

Persamaan yang terdapat dalam jurnal di atas dan penelitian ini adalah fokus pembahasan yang menyatakan bahwa perdagangan satwa liar secara ilegal dapat mengancam stabilitas keamanan nasional suatu negara karena keterkaitannya dengan aktivitas kejahatan transnasional lainnya. Namun, terdapat juga perbedaan dimana jurnal ini membahas mengenai dampak perdagangan satwa liar ilegal sebagai ancaman keamanan nasional dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi alokasi bantuan luar negeri, sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengatasi aktivitas kejahatan perdagangan satwa liar secara ilegal di Meksiko.

Ketujuh, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul “*Organized Crime and Foreign Direct Investment: Evidence from Criminal Groups in Mexico*” yang ditulis oleh *Garriga dan Phillipis* dan diterbitkan di dalam *Journal of Conflict Resolution* pada tahun 2022. Jurnal yang ditulis dengan menggunakan teori ekonomi internasional dan konsep *organized crime competition* ini membahas mengenai bagaimana bentuk kriminal yang terorganisir dapat mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang. FDI atau *Foreign Direct Investment* adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dari luar negeri dapat juga dikatakan sebagai penanaman modal dari suatu negara ke negara lain. Tingkat kejahatan yang terdapat di dalam suatu negara mempengaruhi FDI terutama jika itu adalah negara berkembang. Meksiko menjadi salah satu negara yang menerima penanaman modal asing terbesar. Namun,

Meksiko juga menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, dimana aktivitas kejahatan di Meksiko seringkali menewaskan orang dengan jumlah yang tinggi. Persaingan yang terjadi di antara kelompok-kelompok kriminal yang berada di Meksiko juga menjadi dampak yang buruk terhadap investasi asing. Di Meksiko sendiri, kelompok kriminal seringkali melakukan penyerangan terhadap perusahaan domestik maupun perusahaan asing, seperti contohnya yang terjadi pada tahun 2015 dimana mereka melakukan penculikan terhadap eksekutif dari perusahaan PepsiCo yang dimana pada akhirnya pada tahun 2018 Pepsi menarik diri dari kota Altamirano di Guerrero dan menyalahkan pemerasan dan perampokan yang terjadi kepada perusahaan tersebut dan berakhir memecat 70 orang karyawan.

Bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi FDI (*Foreign Direct Investment*) di negara berkembang seperti Meksiko mencakup penyerangan terhadap perusahaan asing yang dimana pada akhirnya para pekerja mendapatkan dampaknya seperti pemecatan dan bisa saja perusahaan tersebut angkat kaki dari negara yang dianggap memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Namun, selain mempengaruhi investasi dari perusahaan luar negeri, aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang terjadi di negara berkembang seperti Meksiko dapat pula mempengaruhi aktivitas perusahaan-perusahaan dalam negeri, baik dalam segi investasinya pula (Garriga & Phillips, 2022).

Terdapat persamaan dalam jurnal di atas dan penelitian yang sedang dibahas, dimana jurnal di atas membahas mengenai aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal di Meksiko. Namun terdapat pula perbedaan

yaitu jurnal di atas membahas mengenai dampak kelompok organisasi kriminal di Meksiko yang mempengaruhi tingkat FDI di negara berkembang.

Selanjutnya, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul “*Legacies of Resistance: Mobilization Against Organized Crime in Mexico*” yang ditulis oleh *Osorio, Schubiger dan Wentraub* dan dipublikasikan di dalam *Comparative Political Studies* pada tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana mobilisasi dalam melawan aktivitas kejahatan di Meksiko yang bersifat turun-temurun hingga hal tersebut menjadi sebuah warisan dengan menggunakan konsep kriminologi, dimana dalam artikel jurnal ini terdapat strategi yang memungkinkan dapat melawan mobilisasi aktivitas kejahatan di Meksiko seperti inisiatif berbasis komunitas, melakukan bentuk protes dan juga *grassroots movement*. Pada awal abad ke-20, di Meksiko terdapat sebuah gerakan masyarakat yang dikenal sebagai *cristero rebellion* dimana gerakan ini menyuarakan protes masyarakat terhadap pemerintah yang membatasi para masyarakat untuk melakukan kegiatan beragama terutama bagi mereka yang beragama Katolik.

Cristero Rebellion yang terjadi kala itu, ternyata membawa dampak kepada masa depan dimana hal ini berkaitan dengan mobilisasi kejahatan terorganisir di Meksiko. Jaringan yang terdapat di dalam *cristero rebellion* dipercaya dapat membantu dalam melakukan mobilisasi melawan aktivitas kejahatan terorganisir di Meksiko, dikarenakan mereka dapat saling memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain. *Cristero rebellion* juga membuat masyarakat dapat menghadapi situasi yang menekan mereka sehingga mereka dapat mengembangkan kapasitas mobilisasi. Masyarakat yang telah mengalami hal ini dinilai lebih cakap dalam

mengorganisir dan melakukan perlawanan terhadap kejahatan terorganisir (Osorio et al., 2021).

Terdapat persamaan diantara jurnal di atas dengan penelitian ini dimana untuk meminimalisir terjadinya aktivitas kejahatan membutuhkan peran dan inisiatif yang berbasis komunitas juga organisasi internasional. Namun, terdapat pula perbedaan dimana jurnal ini secara hanya membahas aktivitas kelompok kriminal di Meksiko secara historis dan bersifat umum, sedangkan jurnal ini membahas mengenai salah satu aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang difokuskan kepada perdagangan satwa liar ilegal.

Selanjutnya, peneliti merujuk kepada artikel jurnal dengan judul "*Biodiversity Protection in Mexico in The Age of Globalization*" yang ditulis oleh Rea dan Plaza dan dipublikasikan di dalam *Latin America Perspectives* pada tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana tantangan dan strategi untuk melindungi keanekaragaman hayati di Meksiko terutama di era globalisasi dengan menggunakan konsep *global environment governance*. Dalam melewati rintangan juga tantangan untuk melindungi keanekaragaman hayati di Meksiko tentunya tidak mudah dilakukan karena seringkali terdapat hambatan oleh ketidakpastian di tingkat pemerintah dan tentunya diperlukan serangkaian partisipasi dari pemerintah maupun kesadaran masyarakat lokal.

Sejatinya, pemerintah Meksiko telah mengambil Langkah-langkah yang krusial guna melindungi keanekaragaman hayati dengan meratifikasi instrumen internasional yang terjaut serta mengabsahkan undang-undang federal untuk

melaksanakan kewajiban internasionalnya, Kendatipun, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak yang maksimal guna melakukan pelestarian terhadap flora dan fauna beserta ekosistemnya di negara ini apabila terdapat kekurangan peraturan dalam negeri. Terdapatnya ketidakpastian peraturan dapat disebabkan oleh kurangnya kerangka hukum yang komprehensif dan pedoman yang terperinci, kurangnya kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas federal dan lokal juga mempengaruhi hal ini (Rea & Plaza, 2020).

Terdapat persamaan dalam penelitian dan artikel jurnal ini dimana fokus pembahasannya yang membahas mengenai bagaimana globalisasi menjadi salah satu faktor dari terjadinya *habitat loss* di Meksiko. Namun, terdapat pula perbedaannya dimana jurnal di atas menggunakan konsep *global environmental governance* sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *green criminology* dan juga *transnational crime*.

Selanjutnya, peneliti merujuk kepada jurnal dengan judul “*Assessment of Wildlife Crime in a High Biodiversity Region of Mexico*” yang ditulis oleh *Masés-García, Salas-Briones, dan Escalante-Sosa* dipublikasikan di dalam *Journal of Nature Conservation* pada tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana meminimalisir kejahatan terhadap satwa liar, pemanenan secara ilegal, perburuan dan perdagangan ilegal yang kini menjadi isu global yang penting dengan menggunakan konsep *environmental criminology*. Dalam meminimalisir hal ini, peran dari berbagai pihak tentu dibutuhkan termasuk warga lokal dalam konservasi satwa liar, dimana diperlukannya tingkat kesadaran dan keterlibatan warga lokal

dalam meminimalisir terjadinya perdagangan satwa liar contohnya yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang bersangkutan mengenai kejahatan yang terjadi kepada satwa liar.

Dalam menjawab pertanyaan “bagaimana meminimalisir kejahatan terhadap satwa liar, pemanenan secara ilegal, perburuan dan perdagangan ilegal” sejatinya pemerintah negara bagian diharapkan dapat melakukan pengembangan untuk membantu pihak berwenang menerapkan hukum dan melindungi masyarakat dari komunitas lokal yang memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan cara yang bertanggung jawab. Maka dari itu, direkomendasikan pula agar dampak kejahatan terhadap satwa liar menjadi kriteria dalam undang-undang saat ini untuk menentukan status konservasi dan risikonya, juga jenis kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan (Masés-García et al., 2021).

Terdapat persamaan dalam artikel jurnal dan penelitian ini yaitu membahas mengenai *wildlife crime* yang terjadi di Meksiko, namun juga terdapat perbedaan dimana dalam artikel jurnal ini lebih memfokuskan usaha pada konservasi satwa liar dan peran warga lokal sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan peran dari organisasi internasional yaitu UNODC.

Dari literatur-literatur yang telah peneliti kaji, bahwa sesungguhnya fenomena perdagangan satwa liar secara ilegal memang nyatanya terjadi di Meksiko, literatur-literatur di atas menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar secara ilegal membutuhkan perhatian dari pemerintah juga masyarakat lokal, namun tentunya peran dari organisasi internasional juga sangat dibutuhkan. Namun,

dari literatur-literatur sebelumnya masih belum ada yang membahas mengenai peran UNODC dalam meminimalisir aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal di Meksiko. Maka dari itu, peneliti menemukan sebuah kebaruan dari literatur-literatur sebelumnya dimana peneliti membuat sebuah penelitian yang menggunakan UNODC sebagai aktor internasional untuk menangani dan meminimalisir terjadinya aktivitas perdagangan satwa liar secara ilegal di Meksiko.

Untuk memudahkan melakukan perbandingan dari literatur-literatur sebelumnya peneliti membuat tabel tinjauan literatur sebagai berikut:

Tabel 1 Tinjauan Literature

No.	Judul, Penulis & Penerbit	Rumusan Masalah	Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut (Ichwani et al., 2022) Diponegoro Law Journal	Bagaimana peran UNODC dalam memberantas perdagangan narkotika global?	Hukum Internasional	Menggunakan aktor internasional yang sama yaitu UNODC, juga dalam memberantas perdagangan narkotika global ini menggunakan program-program yang diusut oleh UNODC seperti <i>The Global Maritime Crime Programme (GMCP)</i> .	Perbedaan ditemukan di dalam fokus pembahasan dimana jurnal ini membahas mengenai pemberantasan narkotika oleh UNODC.	Dengan adanya fenomena ini maka UNODC membuat program <i>The Global Maritime Crime, Governance committee</i> dan berbagai gerakan sosial juga <i>workshop</i>
2.	Peran <i>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)</i> Dalam Mencegah <i>Bride Trafficking</i> di India Tahun 2011-2014 (Darma & Pahlawan, 2016)	Bagaimana peran UNODC dalam mencegah terjadinya <i>bride trafficking</i> di India?	Organisasi internasional	Persamaan yang terdapat antara jurnal dan penelitian ini ialah menggunakan UNODC sebagai aktor internasionalnya.	Perbedaan dapat ditemukan dalam fokus penelitian dimana jurnal di atas membahas mengenai perdagangan pengantin di India sedangkan penelitian ini	UNODC melakukan penerapan program 3P yaitu Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan dan kerja sama dengan pemerintah India namun mengalami

No.	Judul, Penulis & Penerbit	Rumusan Masalah	Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau				membahas mengenai perdagangan satwa ilegal di Meksiko.	berbagai hambatan.
3.	Efektivitas Program <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) Dalam Penanganan Peredaran Opium di Afghanistan (Pratiwi, 2017) eJournal Ilmu Hubungan Internasional	Bagaimana efektivitas program dari UNODC dalam menangani peredaran opium di Afghanistan?	Organisasi Internasional, Efektivitas program, Drug control	Persamaan yang terdapat dalam artikel jurnal dan penelitian ini ialah, menggunakan peran aktor yang sama yaitu UNODC juga menggunakan program-program yang digagas oleh UNODC untuk mencapai kepentingan bersama	Perbedaan yang terdapat dalam artikel jurnal dan penelitian ini ialah fokus topik permasalahan juga lokasi, dimana artikel jurnal ini membahas mengenai peredaran opium di Afghanistan sedangkan penelitian ini membahas mengenai perdagangan satwa ilegal yang terjadi di Meksiko.	Penanganan terhadap penyebaran opium di Afghanistan dinilai tidak efektif dikarenakan banyaknya faktor yang hambatan.
4.	<i>Exploring the Africa-Asia Trade Nexus for Endangered Wildlife Used in Traditional Asian Medicine: Interviews With Traders in South Africa and Vietnam</i> (Nguyen & Roberts, 2020) <i>Tropical Conservation Science</i>	Bagaimana metode yang efektif untuk mendeteksi dan memantau perdagangan satwa liar ilegal?	Kejahatan transnasional	Persamaan yang terdapat dalam artikel jurnal dan penelitian ini ialah membahas mengenai satu topik permasalahan yang sama yaitu <i>illegal wildlife trade</i> namun terdapat perbedaan dalam fokus lokasi dimana artikel jurnal ini membahas <i>illegal wildlife trade</i> di wilayah Afrika Selatan dan Vietnam.	Terdapat perbedaan dalam jurnal dan penelitian ini yaitu fokus lokasi yang digunakan, dimana jurnal ini membahas mengenai perdagangan satwa ilegal di Vietnam dan Afrika Selatan sedangkan penelitian ini membahas mengenai perdagangan satwa ilegal di Meksiko.	Dengan memperkuat undang-undang domestik Afrika Selatan dan Vietnam harus ditingkatkan untuk melindungi spesies non-asli dan meningkatkan penegakan hukum terhadap satwa liar.
5.	<i>Synthesizing Knowledge on Crime Convergence and the Illegal Wildlife Trade</i>	Bagaimana <i>transnational organized crimes group</i> dapat berperan dan terlibat	Kejahatan transnasional	Artikel jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti	Jurnal ini lebih memfokuskan bagaimana konvergensi kejahatan transnasional	Melalui <i>convergence setting</i> yang terdapat dalam jurnal ini, menyatakan

No.	Judul, Penulis & Penerbit	Rumusan Masalah	Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	(Anagnostou, 2021) <i>Environmental Challenges</i>	dalam perdagangan satwa liar secara ilegal?		dimana terdapat bahasan yang menyatakan bahwa <i>illegal wildlife trafficking</i> merupakan salah satu aktivitas kejahatan kriminal terbesar dan berdampak kepada keamanan terutama keamanan lingkungan.	secara umum dengan perdagangan satwa liar, sedangkan penelitian ini memberikan fokus hanya kepada perdagangan satwa liar secara ilegal.	bahwa terjadinya kolaborasi kejahatan yang dilakukan antar kelompok kriminal.
6.	<i>The Geopolitical Ecology of Conservation: The Emergence of Illegal Wildlife Trade as National Security Interest and the re-shaping of US Foreign Conservation Assistance</i> (Massé & Margulies, 2020) <i>World Development</i>	Bagaimana <i>illegal wildlife trade</i> sebagai ancaman keamanan nasional dapat mempengaruhi alokasi bantuan konservasi asing?	<i>Geopolitical Ecology</i>	Persamaan yang terdapat dalam jurnal di atas dan penelitian ini adalah fokus pembahasan yang menyatakan bahwa perdagangan satwa liar secara ilegal dapat mengancam stabilitas keamanan nasional suatu negara karena keterkaitannya dengan aktivitas kejahatan transnasional lainnya.	Perbedaan pada jurnal ini terdapat dalam fokus pembahasan mengenai dampak perdagangan satwa liar ilegal sebagai ancaman keamanan nasional dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi alokasi bantuan luar negeri, sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengatasi aktivitas kejahatan perdagangan satwa liar secara ilegal di Meksiko.	Terdapat ancaman yang nyata terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh fenomena perdagangan satwa liar ilegal, yang dimana dampaknya dapat membentuk kegiatan kerjasama dalam bentuk bantuan konservasi asing.
7.	<i>Organized Crime and Foreign Direct Investment: Evidence from Criminal</i>	Bagaimana bentuk kriminal yang terorganisir dapat mempengaruhi <i>Foreign Direct</i>	Ekonomi internasional, <i>organized crime competition</i>	Persamaan dalam jurnal di atas dan penelitian yang sedang dibahas, dimana jurnal di atas membahas	Jurnal ini membahas mengenai dampak kelompok organisasi kriminal di	Bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi FDI di negara berkembang seperti Meksiko

No.	Judul, Penulis & Penerbit	Rumusan Masalah	Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	<i>Groups in Mexico.</i> (Garriga & Phillips, 2022) <i>Journal of Conflict Resolution</i>	<i>Investment</i> (FDI) di negara berkembang?		mengenai aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal di Meksiko.	Meksiko yang mempengaruhi tingkat FDI di negara berkembang.	mencakup penyerangan terhadap perusahaan asing.
8.	<i>Legacies of Resistance: Mobilization Against Organized Crime in Mexico.</i> (Osorio et al., 2021) <i>Comparative Political Studies</i>	Bagaimana mobilisasi dalam melawan aktivitas kejahatan terorganisir di Meksiko?	Konsep kriminologi	Terdapat persamaan diantara jurnal di atas dengan penelitian ini dimana untuk meminimalisir terjadinya aktivitas kejahatan membutuhkan peran dan inisiatif yang berbabsis komunitas juga organisasi internasional.	Artikel jurnal ini membahas mengenai mobilisasi gerakan masyarakat dalam memerangi aktivitas kejahatan di Meksiko. sedangkan jurnal ini membahas mengenai salah satu aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang difokuskan kepada perdagangan satwa liar ilegal.	Mobilisasi dalam melawan kejahatan terorganisir di Meksiko dapat menggunakan mobilisasi dari aksi kolektif di masa lalu.
9.	<i>Biodiversity Protection in Mexico in The Age of Globalization.</i> (Rea & Plaza, 2020) <i>Latin America Perspective.</i>	Bagaimana tantangan dan strategi untuk melindungi keanekaragaman hayati di Meksiko terutama di era globalisasi?	<i>Global Environment Governance</i>	Persamaan yang terdapat dalam jurnal di atas dan penelitian ini yaitu fokus pembahasannya yang dimana membahas mengenai bagaimana globalisasi menjadi salah satu faktor dari terjadinya <i>habitat loss.</i>	Terdapat juga perbedaan dimana jurnal di atas menggunakan konsep global environmental governance sedangkan penelitian ini menggunakan konsep yang berkaitan dengan lingkungan.	Untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, pemerintah Meksiko telah memberlakukan undang-undang negara bagian dan federal untuk melindungi keanekaragaman hayati.
10.	<i>Assessment of Wildlife Crime in a High-Biodiversity Region of Mexico.</i> (Masés-García	Bagaimana meminimalisir kejahatan terhadap satwa liar, pemanenan secara illegal, perburuan dan	<i>Environmental criminology</i>	Terdapat persamaan dalam artikel jurnal dan penelitian ini yaitu membahas mengenai	terdapat perbedaan dimana dalam artikel jurnal ini lebih memfokuskan usaha pada	pemerintah negara bagian seharusnya mengembangkan setidaknya satu standar teknis untuk membantu

No.	Judul, Penulis & Penerbit	Rumusan Masalah	Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	et al., 2021) <i>Journal for Nature Conservation</i> .	perdagangan ilegal yang kini menjadi isu global?		<i>wildlife crime</i> yang terjadi di Meksiko.	konservasi satwa liar dan peran warga lokal sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan peran dari organisasi internasional yaitu UNODC	penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Neo-liberal Institusionalisme

Neo-liberal Institusionalisme adalah salah satu teori tradisional dalam studi Hubungan Internasional yang menggunakan perspektif liberalisme sebagai dasarnya. Dikutip dari Robert Keohane selaku pengembang teori ini, bahwa institusi internasional mampu untuk merealisasikan kerja sama yang efektif antar negara-negara. Dalam hal ini, institusi yang dimaksud dapat berupa organisasi internasional seperti contohnya UNODC (Jackson & Sorensen, 2013). Neoliberalis institusionalis berpendapat bahwa meskipun anarki membatasi kemauan negara untuk bekerja sama, negara tetap dapat melakukannya dengan bantuan institusi internasional. Mereka melihat negara sebagai aktor rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan absolut, sehingga memiliki insentif untuk bekerja sama (Karns et al., 2015).

Robert Keohane, dalam bukunya "*After Hegemony*" (1984), menjelaskan bahwa institusi internasional membantu negara mencapai kerja sama dengan menyediakan konteks untuk negosiasi, mekanisme untuk mengurangi kecurangan,

dan transparansi tindakan. Institusi ini membuat komitmen negara lebih kredibel, mengurangi biaya transaksi, dan menyediakan informasi yang membantu pengambilan keputusan. Dengan demikian, institusi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara di dunia yang anarkis (Karns et al., 2015)

Kerja sama antar negara sangat erat kaitannya dengan neo-liberal institusionalisme dengan digunakannya pendekatan behavioralistik yang menegaskan kepada perilaku aktor dalam melakukan kerja sama. Orang-orang yang menggunakan pandangan neo-liberal institusionalisme memiliki kepercayaan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor yang dominan dalam Hubungan Internasional, namun aktor non-negara seperti organisasi internasional pun dinilai berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama antar negara (Jackson & Sorensen, 2013).

2.2.2 Teori Efektivitas Rezim

Rezim internasional dapat diejawantahkan sebagai suatu tatanan yang mencakup prinsip, norma, aturan, serta proses *decision making*, baik secara jelas (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit). Rezim seringkali erat kaitannya dengan harapan dan ekspektasi para aktor yang terlibat dalam hubungan internasional. Rezim internasional memiliki fungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara negara-negara dalam sebuah komunitas internasional, dengan menetapkan standar perilaku, prosedur dan mekanisme guna sebagai penyelesaian konflik (Krasner, 1982). Menurut Robert Keohane, rezim internasional memberikan

fasilitas dalam pembuatan perjanjian internasional, kerangka norma, dan prosedur negosiasi (Keohane, 1982).

Dalam buku *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, Arild Underdal mengemukakan bahwa sebuah rezim dapat dibuktikan efektif apabila rezim tersebut berhasil menjalankan serangkaian fungsi tertentu atau melakukan *problem solving* yang mendorong pembentukan rezim itu sendiri, terutama mengenai permasalahan yang menjadi alasan didirikannya organisasi atau rezim tersebut. Dalam bukunya pula, guna melakukan analisa terhadap efektifnya sebuah rezim dikembangkan melalui tiga variable yaitu variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*) dan variabel intervensi (*intervening variable*) (Miles et al., 2001).

Terdapat tiga komponen untuk melakukan analisa terhadap efektivitas rezim dalam variabel terikat atau *dependent variable* yaitu mencakup *output*, *outcome* dan *impact* yang terdapat di dalam sebuah rezim. **Output** merupakan sebuah kondisi yang ditinjau dari sebelum maupun sesudah rezim atau regulasi yang dikeluarkan oleh rezim baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, dalam konteks ini dijadikan sebagai acuan untuk mengarahkan perilaku aktor utama yaitu negara. **Outcome** merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh rezim yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap sikap dan perilaku anggotanya karena hasil dari implementasi rezim tersebut. **Impact** merupakan sebuah dampak atau hasil dari implementasi sebuah rezim (Miles et al., 2001).

Selanjutnya yaitu variabel bebas atau *independent variable*, variabel ini terbagi menjadi dua komponen yakni *problem malignancy* atau tipe masalah dan *problem solving capacity* atau tingkat penyelesaian masalah. Pada bagian *problem malignancy* terdapat dua tipe kerumitan masalah yang terdiri dari *malign* atau permasalahan yang dianggap ganas (susah untuk diatasi) dan *benign* merupakan permasalahan yang jinak (dapat untuk diatasi). *Problem solving capacity* merupakan kapasitas rezim untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menggunakan *institutional setting* (Miles et al., 2001).

2.2.1.1 Dependent Variables

- *Output*

Output merupakan tahap dari pembentukan sebuah rezim, dimana suatu rezim dapat dinilai berdasarkan kriteria seperti ketatnya peraturan dan juga regulasi, sejauh mana sistem kegiatan yang menjadi target berada di bawah inklusivitasnya juga tingkat kolaborasi yang terjalin. (Miles et al., 2001) Dalam penelitian ini yang menjadi output yaitu UNODC, dimana UNODC merupakan sebuah lembaga yang berdiri dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa yang bekerja guna memberantas kejahatan-kejahatan terutama yang bersifat transnasional. (UNOV, n.d.)

- *Outcome*

Outcome merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh rezim yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap sikap dan perilaku anggotanya karena hasil dari implementasi rezim tersebut (Miles et al., 2001). *Outcome* dalam penelitian ini

berbicara mengenai bagaimana negara-negara anggota mengimplementasikan program dari UNODC untuk mendapatkan capaian dari tujuan dibentuknya program tersebut yaitu melakukan pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang berdampak kepada lingkungan terutama satwa liar. *The Global Programme Combatting On Wildlife and Forest Crime* merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh UNODC, dimana inisiatif ini memiliki tujuan utamanya yaitu untuk mengkategorikan pelanggaran yang dilakukan terhadap satwa liar, kegiatan penebangan liar, dan pelanggaran lain yang saling berhubungan sebagai kejahatan terorganisir transnasional yang berdampak tinggi. Hal ini mencakup pengakuan dan penanganan beratnya pelanggaran-pelanggaran ini dalam skala internasional, dengan fokus pada peningkatan upaya kolaboratif untuk memerangi dan mengadili kegiatan kriminal tersebut, sehingga menggarisbawahi pentingnya menangani masalah-masalah ini dengan keseriusan yang layak dilakukan di tingkat global (UNODC, 2021a).

- ***Impact***

Impact atau dampak adalah hasil dari pengaruh yang muncul dari suatu rezim internasional, yang merupakan respons alami dari seorang aktor untuk mengubah perilaku dalam menghadapi masalah atau isu. Dengan kata lain, *impact* juga dapat diinterpretasikan sebagai perubahan yang terjadi pada anggota, baik negara maupun non-negara, yang dapat mencakup perubahan dalam ketaatan terhadap aturan dan norma yang diberlakukan oleh rezim. Hal ini juga mencakup kemampuan anggota untuk mencapai tujuan utama yang dibentuk oleh rezim tersebut (Miles et al., 2001).

2.2.1.2 *Independent Variables*

Problem Malignancy (Tipe Permasalahan)

- ***Asymmetry***

Asimetri atau keadaan tidak simetris adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepentingan nasional di antara negara-negara anggota suatu rezim. Dalam situasi ini, masing-masing negara anggota memiliki kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan satu sama lain. Akibatnya, regulasi dan kebijakan yang dirancang oleh rezim tersebut mungkin tidak mampu mencakup atau bahkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional dari beberapa atau seluruh anggota rezim. Karena adanya perbedaan ini, implementasi regulasi oleh negara anggota menjadi sulit, dan kesepakatan bersama sukar dicapai. Perbedaan kepentingan nasional ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di antara anggota, yang menghambat kerjasama dan koordinasi yang diperlukan untuk keberhasilan rezim. Dalam konteks asimetri, efektivitas rezim dalam mencapai tujuan bersama menjadi terganggu karena regulasi yang ada tidak dapat memuaskan atau mengakomodasi kepentingan semua negara anggota. Hal ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam perumusan kebijakan rezim agar dapat mengatasi perbedaan dan menciptakan keselarasan yang lebih baik (Miles et al., 2001).

- *Symmetry*

Simetri atau keadaan simetris adalah suatu kondisi di mana terdapat kesamaan kepentingan nasional di antara negara-negara anggota sebuah rezim. Dalam kondisi ini, setiap negara anggota memiliki kepentingan yang selaras atau sejalan satu sama lain. Hal ini memungkinkan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim tersebut dapat diimplementasikan secara efektif oleh semua anggotanya. Karena kesamaan dalam kepentingan nasional tersebut, setiap negara anggota dapat mendukung dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh rezim tanpa mengalami konflik kepentingan yang signifikan. Dengan demikian, kepentingan nasional dari setiap negara anggota tercakup dan terakomodasi dalam regulasi yang dibuat, sehingga memfasilitasi kerjasama dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan rezim. Keadaan simetris ini menjadi fondasi penting untuk keberhasilan operasional dan efektivitas rezim dalam mencapai tujuan bersama (Miles et al., 2001).

- *Cumulative Cleavages*

Perpecahan yang bersifat kumulatif akan terjadi ketika para anggota rezim berada di dalam keadaan yang sama dalam semua dimensi atau permasalahan, sehingga mereka yang menang ataupun kalah dalam satu dimensi juga akan menjadi pemenang atau yang tersisihkan dalam dimensi yang lain. Dalam konteks efektivitas

rezim internasional, cumulative cleavages mempunyai peran dalam menentukan bagaimana rezim tersebut dapat mencapai tujuannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan cumulative cleavages dalam efektivitas rezim internasional dimana salah satunya yaitu perbedaan kapasitas yang terdapat di setiap negara (Miles et al., 2001).

- ***Crosscutting Cleavages***

Crosscutting Cleavages merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara, yang dimana pada akhirnya menjadi sumber perdatuan dalam sebuah rezim internasional. Dalam situasi ini, negara-negara dengan beragam latar belakang dan kepentingan bersedia untuk saling berkompromi dan menyesuaikan diri guna mencapai tujuan bersama. Proses akumulasi dan kompromi ini memungkinkan berbagai kepentingan yang berbeda untuk diintegrasikan ke dalam kerangka kerja rezim internasional. Sebagai hasilnya, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan di antara negara-negara anggota, keberagaman tersebut justru menjadi fondasi bagi terbentuknya kesatuan yang kuat. Negara-negara anggota, melalui serangkaian negosiasi dan penyesuaian, mampu menemukan titik temu yang mengakomodasi berbagai kepentingan mereka. Dengan demikian, cross-cutting cleavages berperan penting dalam memperkuat

solidaritas dan kerjasama antarnegara di dalam rezim internasional, menciptakan ikatan yang memungkinkan rezim untuk berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Proses ini juga menunjukkan pentingnya dialog dan kerjasama multilateral dalam membangun dan memelihara persatuan di tingkat global (Miles et al., 2001).

Dalam melakukan penentuan terhadap indikator diatas, dan menentukan apakah isu tersebut bersikap *benign* atau *malign* maka diperlukan *collective optimum*. *Collective optimum* adalah sebuah instrumen untuk melihat terjadinya sebuah perubahan terhadap sikap dari negara-negara anggota yang menjadi penentuan terhadap ganas atau tidaknya isu tersebut. Hal ini dapat dicermati melalui perubahan sikap suatu negara dalam dua aspek. Pertama, situasi negara saat sebuah rezim dianggap sebagai solusi untuk isu tertentu, terdapatnya variasi dalam tingkat perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh negara tersebut, baik secara signifikan atau minimal. Selanjutnya, dapat diamati dari seberapa baik atau idealnya solusi yang diberikan oleh rezim yang kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota. Perbedaan antara baik (*good*) dan ideal (*ideal*) juga dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepuasan (*satisficing*) dan maksimalisasi (*maximizing*), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Underdal. Hal ini berarti bahwa aturan yang disusun oleh rezim dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap

negara, dan hal ini memengaruhi tingkat efektivitas rezim tersebut (Miles et al., 2001).

Problem Solving Capacity

- ***Institutional Setting***

Institusi mengacu kepada konstelasi hak dan aturan yang mendefinisikan praktik sosial, menetapkan peran bagi para partisipan dalam sebuah aktivitas, juga sebagai pemandu interaksi diantara mereka yang menduduki peran tersebut. Secara sederhana, *institutional setting* dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku anggota rezim satu dengan anggota rezim lainnya. Efektivitas suatu rezim internasional sejatinya dapat dinilai melalui evaluasi aturan-aturan yang terapat dalam permainan yang mengatur rezim tersebut. Aturan-aturan inilah yang menciptakan kerangka kerja yang menjadi arahan interaksi antara anggota rezim, memastikan kepatuhan terhadap norma-norma serta menyediakan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran terhadap aturan-aturan. Kualitas dan penegakan aturan dalam *institutional setting* menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana suatu rezim internasional dapat mencapai tujuannya dan beroperasi secara efektif (Miles et al., 2001).

2.2.1.3 Intervening Variable

- ***Level of Collaboration***

Hubungan antara tingkat kolaborasi dan efektivitas diukur berdasarkan dengan perubahan perilaku. Terdapat asumsi apabila tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh

kerumitan masalah dan kapasitas penyelesaian dari sistem yang membentuk rezim tersebut, namun juga dapat memberikan kontribusi yang positif meskipun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas. (Miles et al., 2001)

Terdapat 6 skala ordinal untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kolaborasi rezim yaitu, **(0) *joint deliberation but no joint action*** artinya terdapat musyawarah diantara anggota-anggota rezim namun tidak melakukan aksi apapun, **(1) *coordination of action on the basis of tacit understanding*** artinya anggota rezim melakukan aksinya berdasarkan pemahaman individu secara diam-diam dan mandiri, **(2) *coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standard but with implementation fully in the hands of national government. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken*** artinya anggota rezim melakukan koordinasi dan melakukan tindakan dengan mengadopsi aturan yang secara jelas dirumuskan namun pelaksanaannya berada sepenuhnya di tangan pemerintah nasional, dan tidak terdapat penilaian terpusat mengenai efektivitas atas tindakan-tindakan yang dilakukan, **(3) *same as level 2 but including centralized appraisal***, *point* ini memiliki kesamaan dengan tingkat ke-2 namun *point* ini terdapat sebuah penilaian terpusat, **(4) *coordinated planning combined with national implementation only includes centralized appraisal of effectiveness***, dalam *point* ini terdapat perencanaan yang dilakukan oleh para anggota rezim secara terkoordinasi yang berkolaborasi dengan implementasi nasional **(5) *coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness***, dalam *point* ini terdapatnya perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara teratur dan di dalamnya terdapat penilaian

efektivitas yang terpusat yang dikoordinasikan oleh para anggota rezim (Miles et al., 2001).

2.2.3 Institusi Internasional dalam Kejahatan Transnasional

Secara tradisional, definisi “lembaga internasional” seringkali digunakan oleh para sarjana dan ahli terdahulu yang merujuk kepada organisasi internasional formal. Namun, hal ini berubah pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980-an dikarenakan adanya kemunculan literatur mengenai rezim internasional yang menjadi sebuah awal bagi para pakar hubungan internasional untuk memperluas pandangan mereka terhadap institusi internasional dan didefinisikan secara lebih sistematis (Duffield, 2007).

Ahli teori rezim yang terkenal seperti Oran Young dan Robert Keohane berpendapat bahwasanya rezim harus dikonseptualisasikan sebagai institusi sosial, yang pada akhirnya memerlukan definisi institusi. Bagi Oran Young, institusi internasional adalah institusi sosial yang mengatur mengenai kegiatan anggota masyarakat internasional, sedangkan Keohane mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan yang persisten dan terhubung (secara formal maupun informal) yang menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas dan membangun harapan (Duffield, 2007).

Di era globalisasi saat ini, tentunya keberadaan institusi internasional menjadi semakin vital terutama dalam melakukan penyelesaian permasalahan global seperti ekonomi, sosial, maupun keamanan. Dalam upaya memecahkan permasalahan global seringkali dipusatkan kepada pembentukan berbagai bentuk-

bentuk institusi internasional, dimana institusi internasional ini mencakup peraturan internasional dan organisasi internasional (Coglianese, 2000).

Dalam hubungan internasional, negara merupakan aktor utama dalam panggung internasional yang artinya negara-negara dapat bersatu dan membentuk organisasi antar pemerintahan/*International Governemental Organizations* (IGO) dan badan-badan internasional atau *International Agencies*. Dalam proses pembentukan IGO dan IA, negara-negara telah melaksanakan kesepakatan untuk terikat kepada beberapa aturan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban yang berlandaskan prinsip kedaulatan, integritas territorial, dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri anggota negara lain. Terdapat perbedaan diantara IGO dan IA, yang mana IGO terdiri dari negara-negara berdaulat dan pada umumnya didirikan berdasarkan perjanjian formal. Sedangkan IA merupakan model kecil dari IGO yang berada di bawah badan politik dan ekonomi yang lebih besar (Zabyelina, 2019).

Terdapat fungsi utama yang diberikan kepada IGO dan IA diantara lainnya yaitu (a) pengumpulan, pembagian, dan analisis informasi; (b) regularisasi kerjasama antar negara dan pembentukan konsesus; (c) perumusan dan sosialisasi norma, standa dan praktik yang dapat diterima secara internasional; dan (d) penyediaan bantuan hukum dan teknis. Terdapat pula organisasi dengan isu tunggal dan multi isu (*multi issue organizations*) seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari organisasi-organisasi tersebut terdapat beberapa organisasi yang mengizinkan keanggotaan universal dan memiliki keanggotaan dan manajemen

yang seimbang secara geografis, sementara keanggotaan lainnya didasarkan kepada kriteria tertentu (Zabyelina, 2019).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan IGO yang memiliki keanggotaan dan staff terbesar di dunia juga memiliki jaringan IA yang terluas, termasuk IA yang memiliki mandat untuk melawan kejahatan transnasional. Kini, terdapat sekitar 15 badan khusus yang menjalankan fungsi atas nama PBB yang dimana Sebagian dari pekerjaan yang dilakukan memberikan kontribusi penting dalam mencegah dan memberi respons terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Salah satu IA yang memiliki mandate untuk melawan kejahatan transnasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (Zabyelina, 2019).

UNODC merupakan kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan yang didirikan pada tahun 1997 yang merupakan sebuah produk dari kolaborasi antara Program Pengendalian Narkoba PBB (*United Nations Drug Control Programme*) dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional (*Centre for International Crime Prevention*) dalam melakukan operasinya melawan kejahatan transnasional, UNODC beroperasi di seluruh wilayah di dunia melalui jaringan kantor lapangan yang luas. Kegiatan yang dilakukan UNODC terbagi kedalam lima bidang yang saling berkaitan seperti kejahatan terorganisir dan perdagangan manusia, korupsi, pencegahan dan reformasi peradilan pidana, pencegahan narkoba, dan pencegahan terorisme (Zabyelina, 2019).

Kejahatan transnasional terorganisir dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan yang dilakukan secara berkelompok, dengan melakukan tindak kekerasan, korupsi atau kegiatan yang berkaitan guna memperoleh keuntungan finansial atau materi secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah kejahatan terorganisir dapat dikatakan secara transnasional apabila kegiatan tersebut beroperasi di dua negara atau lebih. Kejahatan terorganisir transnasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terus berkembang seiring waktu, hal ini juga berlaku untuk kelompok dan jaringan yang terlibat. Aktivitas yang kerap dilakukan oleh organisasi kriminal transnasional mencakup perdagangan manusia, senjata, obat-obatan, mineral dan satwa liar, produksi dan perdagangan barang palsu, penipuan dan pemerasan, pencucian uang dan kejahatan yang dilakukan di dunia maya (Caparini, 2022).

Kejahatan terorganisir transnasional tentunya seringkali berkembang di negara-negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi seperti negara-negara yang berada di kawasan Amerika Latin, salah satunya yaitu Meksiko. Dimana Meksiko memiliki *crime rate* yang dapat dikatakan tinggi yaitu mencapai nilai 7.57 pada tahun 2023 (Global Organized Crime Index, 2023). Aktivitas kejahatan terorganisir transnasional di Meksiko mencakup perdagangan manusia yang terhubung dengan kegiatan *sex trafficking*, diiringi dengan penjualan narkoba dan senjata secara ilegal. Melihat dari sudut pandang lingkungan Meksiko yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tentunya kejahatan terhadap satwa liar juga sering terjadi di Meksiko meliputi kegiatan perdagangan satwa liar secara ilegal.

Dalam menanggapi berbagai kejahatan terorganisir transnasional, UNODC sebagai IA tentu melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya penyebaran aktivitas ilegal tersebut. UNODC bekerja sama erat dengan sistem hukum dan lembaga penegak hukum di Negara-negara Anggotanya, yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, upaya ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, legislatif, dan peraturan terkait kejahatan terhadap satwa liar dan hutan. Hal ini mencakup advokasi undang-undang dan peraturan yang lebih kuat yang dapat mengatasi dan memberantas aktivitas terlarang ini dengan lebih baik.

2.2 Asumsi Penelitian

Fenomena perdagangan satwa liar yang dewasa ini menjadi perhatian masyarakat global mempunyai dampak yang cukup destruktif terhadap keamanan lingkungan. Dengan melihat hal ini UNODC sebagai organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB membuat berbagai program juga kerjasama dengan organisasi dan mitra lainnya. Maka dari itu terciptalah asumsi penelitian sebagai berikut:

“Implementasi program *Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime* oleh UNODC terkait kejahatan terhadap satwa liar dan lingkungan mendapatkan Meksiko berada dalam kondisi *asymmetry* yang menurut teori efektivitas rezim artinya terdapat kesamaan kepentingan nasional dengan anggota rezim lainnya sehingga dapat menurunkan tingkat

kriminalitas terhadap satwa liar di Meksiko. Maka dari itu, isu *wildlife crime* di Meksiko bersifat *benign* atau dapat diatasi dengan bantuan UNODC”

2.3 Kerangka Analisis

